

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai basis pengembangan sumber daya manusia, keberhasilannya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu sumberdaya yang kuat sebagai hasil pendidikan merupakan sumbangan positif terhadap kemampuan bangsa pada percaturan dunia global. Kondisi tersebut harus menjadi acuan karena pada era globalisasi bangsa Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan, seperti tantangan dalam perdagangan internasional sebagai konsekuensi dari berlakunya pasar bebas di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik, tantangan penerapan demokrasi, penegakan hukum, desakan atas perwujudan nilai-nilai persamaan dan keadilan, serta pemenuhan rasa ketenteraman dan keamanan masyarakat. Sehubungan dengan tantangan-tantangan itu Bangsa Indonesia mencoba menata kembali bagaimana seharusnya menggulirkan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Dengan alasan itu pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional mencoba mengembangkan berbagai program untuk memacu pendidikan agar menjadi tulang punggung perubahan dan perkembangan bangsa di antaranya; melalui penataan kembali permasalahan pokok penyelenggaraan pendidikan pada konteks otonomi daerah, meliputi : penyelenggaraan pendidikan merupakan kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, perluasan dan pemerataan (accses), peranserta masyarakat, serta akuntabilitas. Permasalahan-

permasalahan pokok tersebut dijelaskan (Fiske, 1966; Nurhadi, 1999; Satori, 1999) dalam Mulyasa (2004: 17-19) sebagai berikut :

Pertama, pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar setiap warga negara, oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan merupakan kepentingan nasional, hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh pasal 1945. Kemungkinan permasalahan yang muncul adalah bagaimana melalui otonomi daerah ini masing-masing daerah kabupaten dan kota, yang memiliki potensi sumber dana berbeda, dapat menjamin agar setiap penduduk memperoleh hak mendapatkan pengajaran yang baik. Kondisi tersebut bukan saja akan melahirkan isu perluasan dan pemerataan pendidikan, khususnya dalam rangka wajib belajar, tetapi bagaimana menyediakan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas sesuai dengan tuntutan reformasi, sehingga menjamin keadilan setiap penduduk. Kepentingan nasional lainnya adalah kesadaran akan makna pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. Permasalahannya adalah bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sering kurang menarik bagi sebagian pejabat karena hasilnya tidak segera tampak, berbeda dengan pembangunan fasilitas jalan, irigasi, dan pasar. Persoalannya adalah bagaimana menjaga agar sumber dana untuk pendidikan tetap terjamin dan memperoleh prioritas dalam alokasi anggaran daerah kabupaten dan kota.

Kedua, masalah yang berkaitan dengan jaminan mutu pendidikan. Dengan mendekati kastemer pendidikan external (khususnya orang tua dan masyarakat), aspirasi mereka lebih terakomodasi, demikian pula control dalam rangka akuntabilitas bisa dilakukan secara wajar. Masalahnya adalah bagaimana menjamin disvaritas kualitas yang disebabkan oleh adanya konteks lokalitas yang cenderung memunculkan kriteria pendidikan yang memenuhi tuntutan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam konteks nasional, bahkan internasional. Hasil penelitian Fiske (1996) di New Zealand dan Chile, menunjukkan bahwa : Faktor yang cukup berpengaruh dalam praktek desentralisasi adalah ketersediaan dana yang memadai.

Ketiga, berkaitan dengan efisiensi pengelolaan, argumentasi desentralisasi adalah bahwa melalui pemberdayaan lembaga lokal diharapkan terjadi efisiensi, karena meningkatnya motivasi kerja dan terbukanya masalah birokrasi. Efisiensi tersebut berkaitan dengan efisiensi manajemen serta efisiensi dalam pengurusan dan penggunaan dana. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan masalah anggaran secara tepat dan produktif.

Keempat, desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan aspirasi masyarakat akan pendidikan, yang dengan sendirinya akan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Namun demikian, hal ini akan dibayar mahal dengan kemungkinan terjadinya jarak yang semakin besar antara daerah dalam pemerataan fasilitas pendidikan dan mendorong

peningkatan kesenjangan kualitas pendidikan. Tanpa manajemen yang tepat, masyarakat di daerah yang kaya cenderung menikmati fasilitas pendidikan yang lebih baik dari daerah miskin.

Kelima, dalam undang-undang pemerintahan daerah 1999 dijelaskan bahwa salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk peningkatan sumber dana pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan secara perorangan, kelompok maupun lembaga, seperti industri. Peran serta perorangan dan kelompok dalam pendidikan akan lebih efektif karena langsung dapat dinikmati oleh masyarakat.

Keenam, melalui program otonomi daerah pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan layanan pendidikan akan semakin mendekati masyarakat yang dilayaninya (kustomer), sehingga akuntabilitas layanan bergeser dari yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintah pusat kepada akuntabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara luas dan terbuka. hal ini mengandung arti bahwa pengambilan keputusan tentang pelaksanaan pendidikan di daerah menuntut partisipasi masyarakat dan orang tua yang lebih luas dan terbuka, terutama dalam menumbuhkan manajemen yang transparan dan demokratis.

Sejalan dengan keenam permasalahan pokok penyelenggaraan pendidikan pada konteks otonomi daerah tersebut, maka permasalahan yang terjadi dan sering muncul pada penyelenggaraan pendidikan dasar khususnya sekolah dasar (SD) merupakan persoalan menarik untuk di bahas dan dibicarakan dengan tuntas. Salah satu permasalahan pokok pendidikan dasar saat ini adalah berkaitan dengan masih rendahnya mutu pendidikan dasar. Permasalahan itu terjadi sebagai akibat dari :

Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan analisis input-output tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Pendekatan ini beranggapan apabila input telah dipenuhi, maka otomatis output pendidikan akan baik. Pada kenyataannya, hal ini tidak terjadi. Selama ini kita terlalu memperhatikan input dan kurang memperhatikan proses pendidikan itu sendiri.

Kedua, pendidikan dilakukan secara birokratik sentralistik. Dan *ketiga*, peran serta warga sekolah, khususnya guru, dan masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat kurang.

Pada sisi lain Dedy Spriadi dalam satu tulisannya pada Koran Pikiran Rakyat edisi Bulan Desember 2002 menyebutkan :

Permasalahan pada pendidikan dasar yang sering muncul di antaranya : Gaji guru di sunat, Sekolah Dasar Ambruk, Siswa Sekolah Dasar belajar di lantai, kekurangan guru, keterlambatan gaji, gaji guru dirampok kepala sekolah, kemampuan dan motivasi mengajar guru rendah, kekurangan sarana prasarana, kurikulum yang sudah usang dan tidak mengikuti perkembangan dunia global, model evaluasi monoton, guru menjual soal, kepala sekolah dipusingkan dengan banyaknya administrasi, juga berkaitan dengan persoalan penggunaan kata-kata based, sehingga memusingkan guru dan pelaku pendidikan. (Dedy Supriadi, Pikiran Rakyat, Desember 2002).

Konsekwensi dari masalah-masalah tersebut perlu penanganan yang lebih profesional dan tidak pernah berhenti. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya berkaitan dengan permasalahan pendidikan dasar adalah: berkaitan dengan manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif. Sekolah adalah institusi yang memegang peranan kunci dalam menentukan mutu pendidikan dasar dan kepala sekolah merupakan pelaku utama dalam memainkan peranan tersebut. Peningkatan mutu sekolah memerlukan kepala sekolah yang mampu: (a) menjabarkan sumber daya yang ada untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi guru, bahan pengajaran yang cukup, dan pemeliharaan fasilitas yang baik; (b) memberikan waktu yang cukup untuk pengelolaan dan pengoordinasian proses instruksional; dan (c) berkomunikasi secara teratur dengan staf, orang tua, siswa, dan masyarakat terkait.

Berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, pada tatanan penyelenggaraan pendidikan dasar kemampuan guru dan kepala sekolah merupakan ujung tombak dan penentu bagi penyelesaian masalah-masalah tersebut. Disamping itu pula peran orang tua siswa dan masyarakat merupakan pembantu utama yang dapat memberikan ketenangan kepada guru dan kepala sekolah dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi. Yang paling penting harus diciptakan di sekolah adalah kemampuan sekolah (unsur-unsur civitas akademika sekolah) dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya secara mandiri dan otonom. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran yang dikembangkan dalam manajemen mutu bahwa, kerangka dasar yang perlu diciptakan di sekolah khususnya Sekolah Dasar adalah bagaimana membentuk civitas akademika sekolah menjadi lebih mandiri.

Perkembangan paradigma baru pendidikan telah mampu melahirkan konsep MBS atau manajemen mutu berbasis sekolah. Konsep manajemen mutu berbasis sekolah dikembangkan dalam rangka memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong tumbuhnya proses pengambilan keputusan yang partisipatif dengan melibatkan secara langsung semua warga sekolah meliputi guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendididk: nasional. Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar pula dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah menjadi lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah pada akhirnya akan lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan

dan potensi yang dimilikinya. Demikian pula dengan pengambilan keputusan partisipatif, yakni dengan jalan memberikan peluang yang luas terhadap seluruh komponen sekolah dan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat mamacu tumbuh kembangnya rasa memiliki warga sekolah dan masyarakat terhadap kemajuan pendidikan yang dilakukan di sekolah. Tumbuhnya rasa memiliki pada warga sekolah dan masyarakat terhadap sekolah tersebut, secara langsung dapat meningkatkan tanggung jawab dan dedikasinya terhadap peningkatan mutu pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Inilah esensi dasar dari implementasi pengambilan keputusan yang partisipatif. Baik peningkatan otonomi pendidikan sekolah maupun pengambilan partisipatif tersebut, seluruhnya ditujukan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional yang berlaku.

Sejalan dengan pemikiran di atas, kemandirian sekolah yang berkaitan dengan kemandirian dalam hal pemanfaatan lingkungan sebagai sumberdaya dan sebagai inspirasi inovatif dalam menciptakan dan mengembangkan kualitas sekolah terutam dalam hal kemampuan menemukan dan menggali strategi dan model pengelolaan yang mampu mempartisipasikan semua pihak terutama masyarakat yang berada pada lingkup di mana sekolah dasar itu berada. Hal ini bukan berarti sebagai akibat keterbatasan sekolah atau kekurangan sekolah dalam arti sekolah tidak memiliki dukungan infra-struktur yang memadai untuk menciptakan kondisi tersebut, melainkan justru kondisi tersebut harus menjadi standar aktivitas dan kreatifitas sekolah.

Pemikiran tersebut sejalan dengan tujuan MPMBS, yakni:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah.
4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. (Depdiknas, 2000: 12)

Esensi sesungguhnya dari tujuan sebagaimana di atas, adalah otonomi sekolah plus pengambilan keputusan partisipatif untuk menciptakan mutu sekolah. Otonomi dalam hal ini diartikan sebagai sebuah kewenangan/ kemandirian pihak sekolah (kepala sekolah, guru) dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, serta merdeka dan tidak tergantung pada siapapun dan pihak manapun.

Sekolah yang mandiri dan berdaya setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) tingkat kemandirian tinggi dan tingkat ketergantungan rendah, (b) bersifat adaptif dan antisipatif, proaktif sekaligus, (c) memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, (d) bertanggung jawab terhadap kinerja sekolah, (e) memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, (f) memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, dan (g) komitmen yang tinggi pada dirinya, dan prestasi yang merupakan acuan bagi penilaiannya.

Jika karakteristik tersebut dipahami oleh sekolah, serta sekolah betul-betul mampu menerapkannya, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah dasar seperti telah diungkap pada awal pembahasan ini, akan terjawab dengan tuntas. Namun demikian karakteristik tersebut hanya sebatas konsep saja, mengingat dalam kenyataannya cukup sulit menemukan sekolah-sekolah yang



Karakteristik kemandirian sebagaimana uraian di atas, khususnya pada aspek kemandirian sekolah dasar.

Dengan asumsi tersebut maka diperlukan suatu kajian inovasi tentang suatu model pengelolaan sekolah dasar yang dapat secara efektif mengembangkan dan meningkatkan otonomi sekolah dan kemandirian guru dalam hal kemampuan dan keterampilan memanfaatkan sumber-sumber yang ada dilingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar dan sebagai insiparsi lahirnya metode-metode analisis dalam meningkatkan kemampuan sekolah dalam mengelola dirinya. Ikhtiar ini menjadi sangat penting, karena hanya dengan pengembangan suatu model pengelolaan sekolah dasar yang efektiflah, maka keterampilan guru dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan insprasi lahirnya model pengelolaan inovatif yang berbasis masyarakat akan dapat dimiliki oleh kepala sekolah secara optimal. Jika harapan ini dapat terwujud, setidaknya akan menjadi kontribusi yang signifikan bagi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah dasar, khususnya berkenaan dengan kekurangan sarana prasarana mengajar dan belajar serta kurangnya kepedulian (partisipasi dan tanggungjawab) masyarakat, guru, kepala sekolah dalam membangun dan mengembangkan sekolah yang berkualitas.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah Penelitian

Pendidikan dasar sebagai basis pendidikan, kualitas dan keberhasilannya sangat berpengaruh terhadap kualitas di jenjang pendidikan berikutnya. Pada tatanan yang lebih khusus keberhasilan dan tingginya kualitas pendidikan dasar dihasilkan oleh terintegrasinya faktor-faktor yang ada dalam sistem pendidikan

dasar itu sendiri. Faktor-faktor tersebut bisa dilihat dari input, *process* dan *product* (hasil). Input dilihat dari latar belakang anak didik (siswa) itu sendiri, dapat dilihat dari kondisi sosial, ekonomi orang tua (keluarga), maupun kepedulian orangtua terhadap pendidikan anaknya sebelum masuk dunia sekolah dasar. Faktor input dapat dianalisis dari dua hal yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan instrumental input dan faktor-faktor environmental input.

Faktor *instrumental input* dan *enviromental input* merupakan salah satu bagian strategis dalam mendukung manajemen penyelenggaraan pendidikan pada tingkat sekolah dasar. Faktor instrumental input merupakan faktor-faktor yang berkaitan dengan sarana-parasarana penunjang aktivitas edukatif di sekolah, sedangkan faktor enviromental input merupakan faktor yang berhubungan dengan karakteristik lingkungan sekitar tempat penyelenggaraan pendidikan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam menunjang proses mengajar di sekolah. Sehubungan dengan itu Gaffar (1987:125) menyatakan, bahwa "fungsi guru yang langsung menangani proses belajar di kelas amatlah strategis dalam upaya meningkatkan adaptabilitas manajemen sekolah terutama dalam kaitannya dengan proses belajar anak".

Adaptabilitas manajemen pendidikan dasar khususnya di sekolah dasar yang dianggap paling mendasar saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan dasar diakibatkan oleh adanya keterbatasan infra struktur dan kemampuan kepala sekolah dan civitas akademika sekolah dasar dalam mengelola sekolah dasar yang sekaligus berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas produk (hasil/lulusan). Masalah-masalah tersebut tampak terlihat dari: (1) tingginya tingkat droup out



dasar, (2) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah dasar, (3) rendahnya kemandirian sekolah terutama kemandirian dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada (terbatas), dan (4) tidak ada keleluasan kepala sekolah dalam mengembangkan model pengelolaan sekolah yang mampu membangun sekolah secara mandiri (otonom). Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan sebuah model pengelolaan sekolah dasar yang dapat dijangkau oleh kemampuan daya dukung sekolah, dan tidak terlalu mahal serta diharapkan mampu meningkatkan kemandirian sekolah terutama kemandirian sekolah dalam memberdayakan sumber-sumber yang ada di sekolah maupun di lingkungannya. Maka untuk itulah model pengelolaan sekolah dasar berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab kondisi dan permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan masalah penelitiannya sebagai berikut: *Bagaimana implementasi model pengelolaan program sekolah dasar berbasis masyarakat yang efektif bagi peningkatan kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumber daya sekolah ?*

C. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan pendidikan pada tingkat sekolah dasar, terutama permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan program sekolah dasar khususnya berkaitan dengan tujuan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMBS), di mana di dalamnya terfokus pada peningkatan inisiatif dan kemandirian sekolah melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan program sekolah. Partisipasi aktif masyarakat dapat dianalisis dari keterlibatan/tanggungjawab masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam

mengelola sekolah terutama dalam perencanaan, implementasi sampai pada tingkat pengawasan. Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penelitian ini mencoba menjawabnya dengan terlebih dahulu mengajukan masalah: ***“Apakah model pengelolaan program sekolah dasar berbasis masyarakat secara signifikan berhubungan dengan kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumberdaya sekolah? ”***.

Mengacu pada pertanyaan umum, maka pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan model pengelolaan sekolah dasar berbasis masyarakat dapat dianalisis dari: 1) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program sekolah dasar meliputi sub variable : a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, b) partisipasi masyarakat dalam implementasi program dan, c) partisipasi masyarakat dalam pengawasan program. 2) kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumber daya sekolah, indikator yang berkaitan di dalamnya meliputi : a) otonomi sekolah dasar, b) demokrasi, c) kompetitif, d) kreatif, e) akuntabilitas dan, f) unggul.

Mengacu pada variable-variabel dan indikator-indikator yang dapat dianalisis maka secara khusus pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program sekolah dasar? Khususnya; partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam implementasi program dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program sekolah dasar.

2. Bagaimana hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program sekolah dasar khususnya ; partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam implementasi program dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program sekolah dasar dengan kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumber daya sekolah?
3. Bagaimana perbedaan tingkat kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumberdaya sekolah antara yang tidak dan yang menerapkan model pengelolaan program sekolah dasar berbasis masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan model pengelolaan program sekolah dasar berbasis masyarakat serta hubungannya dengan kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumberdaya sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan studi eksplorasi melalui analisis korelasional agar mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang secara nyata berhubungan dengan kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumberdaya sekolah. Berdasar kepada hasil penelitian tahap pertama, kemudian disusun sebuah model konseptual pengelolaan sekolah dasar berbasis masyarakat yang dilandasi prinsip dan karakteristik: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program sekolah dasar terutama dalam a) perencanaan, b) implementasi program-program sekolah dasar serta, c) pengawasan.

Kemandirian sekolah dasar dalam memanfaatkan sumberdaya sekolah, meliputi konsep kemandirian dengan berdasar pada indikator : a) otonomi sekolah

dasar, b) demokrasi, c) kompetitif, d) kreatif, e) akuntabilitas dan f) unggul.

Mengacu pada tujuan umum di atas, maka tujuan studi ini adalah untuk:

1. Mendapatkan gambaran yang jelas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program sekolah dasar. Khususnya; partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam implementasi program dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program sekolah dasar.
2. Memperoleh informasi mengenai hubungan antara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program sekolah dasar khususnya ; partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam implementasi program dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program sekolah dasar dengan kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumber daya sekolah.
3. Mendapatkan gambaran mengenai tingkat kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumberdaya sekolah antara yang tidak dan yang menerapkan model pengelolaan program sekolah dasar berbasis masyarakat.

E. Kerangka berpikir dan Teori Pendukung

1. Kerangka berpikir

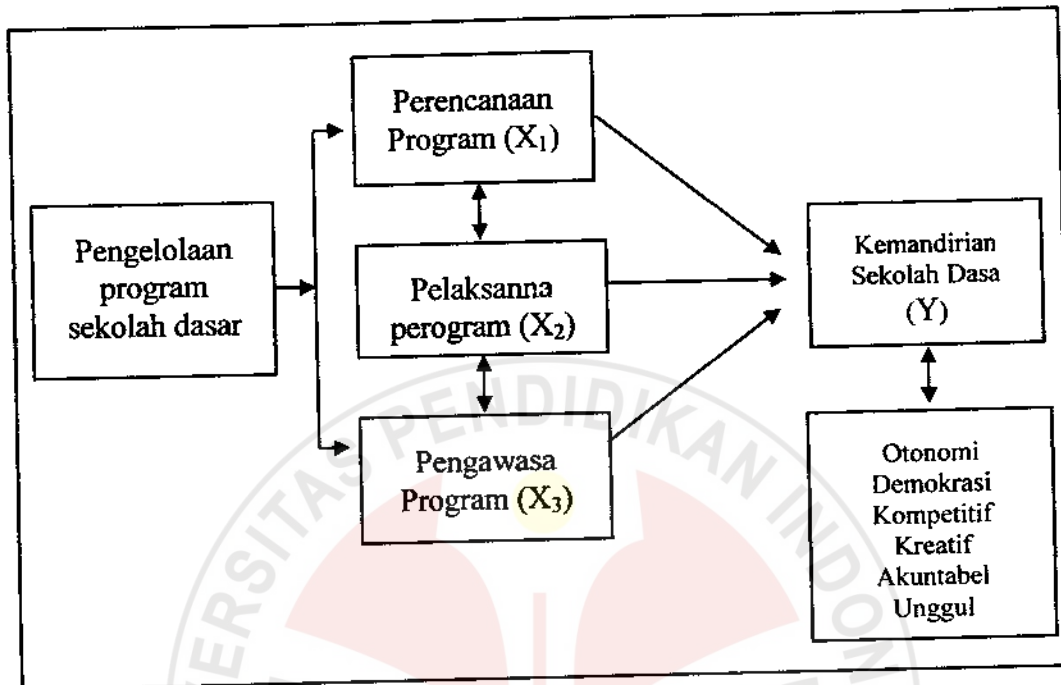
Penelitian ini menggunakan dua model analisis, model analisis pertama berkaitan dengan model hipotesis yang diasumsikan memiliki hubungan kuat dengan pengembangan model yang akan diujicobakan. Model analisis kedua berkaitan dengan ujicoba model dari hasil analisis model pertama uji coba model akan coba dianalisis dengan menggunakan pendekatan eksperimen. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

Mengacu pada tujuan penelitian dan masalah penelitian, maka variabel utama yang dianggap memiliki hubungan dengan kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumberdaya sekolah adalah berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program sekolah dasar dengan sub-variabel; partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam implementasi program dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program sekolah dasar sebagai variabel faktor dianggap sebagai variabel dominan dan berpengaruh terhadap variabel kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumberdaya sekolah. Kondisi tersebut didasarkan kepada asumsi bahwa secara konseptual partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program sekolah dasar adalah merupakan sisi penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang secara konseptual dianggap memiliki hubungan kuat dengan kemandirian sekolah dalam melihat, menganalisis, menggali dan memanfaatkan sumberdaya sekolah. Kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumberdaya sekolah dalam penelitian ini dikategorikan sebagai variabel respon atau variabel yang dipengaruhi. Untuk analisisnya dipergunakan teknik analisis kuantitatif dengan metoda analisis korelasional. Jenis analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana variabel-variabel penelitian ini saling berhubungan dan satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi secara signifikan.

Pengembangan analisis korelasional berdasar kepada hubungan keterkaitan antara *variable factor* beserta sub-variablenya dengan *variable respon*,

secara jelas hubungan dan keterkaitan antar *variable* itu tergambar pada bagan berikut :

HUBUNGAN VARIABEL PENELITIAN



Gambar 1.1 : Hubungan Variabel Penelitian

Variabel utama penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah dasar dengan sub-variable X_1 partisipasi masyarakat dalam perencanaan, X_2 Partisipasi masyarakat dalam implementasi program dan X_3 partisipasi masyarakat dalam pengawasan, sub-variabel inilah yang dijadikan sebagai variable analisis dalam penelitian ini dan dianggap memiliki hubungan kuat dengan variable kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumber daya sekolah Y.

Model analisis kedua dikembangkan model eksperimen dengan model sebagai berikut:

a. Rancangan penelitian eksperimen

Untuk menguji efektifitas model pengelolaan sekolah dasar berbasis masyarakat bagi peningkatan kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekolah, diperlukan uji eksperimen yang mampu membuktikan apakah model yang dikembangkan dapat efektif. Mengingat hanya metoda penelitian inilah yang sangat relevan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel terikat, di samping telah dilakukan uji analisis diagram seperti pada model analisis pertama, hal ini dimaksudkan untuk melihat validitas variabel yang diuji pada uji eksperimen (Plutchik, 1983: 26; Smith and Glass, 1987: 125; dan Creswell, 1994: 11).

Rancangan yang digunakan pada model analisis eksperimen adalah dengan desain dua kelompok. Hal ini digunakan untuk memperoleh hasil yang memiliki validitas dan kredibilitas tinggi. (Plutchik, 1983: 38). Adapun rancangannya adalah sebagai berikut:

TABEL 1.1
RANCANGAN PENELITIAN DENGAN MENGGUNAKAN
DESAIN *NON-EQUIVALENT CONTROL GROUP*

Kelompok	Tes Awal	Perlakuan	Tes Akhir
Kelompok 1	Y_1	X	Y_2
Kelompok 2	Y_2	-	Y_2

Kelompok I merupakan kelompok eksperimen yang diberikan tes awal, perlakuan model pengelolaan program sekolah dasar berbasis masyarakat, dan tes akhir. Kelompok kedua adalah kelompok kontrol yang diberikan tes awal dan tes akhir, namun tidak diberikan perlakuan.

b. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini ada dua kategori, yakni : subjek penelitian pertama adalah subjek penelitian untuk kepentingan uji analisis korelasional atau untuk menguji keterhubungan tiap-tiap sub-variable penelitian yang hasilnya akan dicobakan dalam penelitian eksperimen. Untuk kegiatan penelitian korelasional subjek penelitiannya meliputi 10 Sekolah Dasar inti yang ada di Kabupaten Sumedang masing-masing di Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Selatan Utara, Kecamatan Cimalaka, dan Kecamatan Tanjungkerta, dengan di dalamnya melibatkan Guru, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan orang tua siswa (orang tua wali) yang ada di Sekolah Dasar-Sekolah Dasar inti tersebut. Subjek penelitian kedua atau untuk uji eksperimen ditetapkan 2 Sekolah Dasar dengan menggunakan teknik *sampling purposif*, atau dengan cara pengambilan sampel yang berdasarkan pada karakteristik tertentu. Dengan teknik sampling tersebut maka diperoleh dua sekolah yakni Sekolah Dasar Sukaraja I di Kecamatan Sumedang Selatan dan Sekolah Dasar Cibeureum I di Kecamatan Cimalaka. Secara lebih tajam karakteristik sampel untuk uji eksperimen akan diuraikan pada bab tiga penelitian ini.

2. Teori Pendukung

Beberapa teori yang dapat dijadikan asumsi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model pengelolaan program sekolah dasar berbasis masyarakat memiliki potensi mengembangkan kemampuan dan kemandirian sekolah dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya sekolah dan lingkungannya sehingga sekolah

tersebut lebih bermutu dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. (Newmann, 1975). Pada konteks kemandirian sekolah dasar dapat dianalisis dari indikator-indikator yang menjadi dasar kemandirian yakni : a) otonomi, b) demokrasi, c) kompetitif, d) kreatif dan e) unggul. (Jalal dan Supriadi, 2001:44).

- a. *Manajemen by objectives* mempunyai siklus atau proses, yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: 1) identifikasi tujuan, tanggungjawab, dan tugas-tugas; 2) pengembangan standar prestasi (performance); dan 3) pengukuran dan penilaian prestasi. (Fatah, 2003:33)
- b. Peran serta aktif serta tanggungjawab semua tingkatan dalam manajemen sangat menentukan tercapai tidaknya sasaran. (Reddin : 1977)
- c. Proses manajemen pada intinya meliputi: 1) pengakuan masalah; 2) merumuskan masalah, mengembangkan alternatif tindakan; 3) keputusan; implementasi dan; 4) hasil pengawasan. (Murdick dan Ross dalam Fatah, 2003 : 47)
- d. Pengelolaan program sekolah dasar berbasis lingkungan bisa dilihat dari, tanggung jawab pengelolaan, tingkat keterlibatan (partisipasi) dalam pengelolaan dan motivasi untuk memberikan dukungan dalam pengelolaan. (Koontz, O'Donnel, Weihrich, 1996).

Mengacu pada kerangka berpikir dan teori-teori pendukung, maka keterkaitan antar variabel peneliti tergambar pada bagan 1.2. Berikut:

TABEL 1.2
KETERKAITAN ANTAR VARIABEL PENELITIAN

Masyarakat (Komite Sekolah)	Pengelolaan Sekolah Dasar	Kemandirian Sekolah Dasar
Partisipasi (tanggungjawab dan keterlibatan)	- Perencanaan - Implementasi program sekolah - Pengawasan	Memanfaatkan sumber daya sekolah

F. Hipotesis penelitian

Pada bagian pembatasan dan perumusan masalah penelitian, telah diungkapkan sebuah hipotesis umum penelitian. Pada hipotesis tersebut, hanya tergambar bagaimana hubungan fungsional antara variabel, sehingga tidak tampak hubungan dengan kelompok variabel lainnya. Hipotesis tersebut disusun sebagai pertimbangan, bahwa pada variabel *endogen* (bebas) itulah manipulasi atau perlakuan akan diberikan untuk mendapatkan model pengelolaan program sekolah dasar yang inovatif dan ditawarkan.

Secara rinci dikembangkan variabel penelitian ini secara bivariat maupun secara multivariat. Demikian juga hipotesis bisa dikembangkan dalam hubungan langsung secara linier maupun secara bertahap melalui variabel lain. Jumlah hipotesis turunan itu bisa dikembangkan sebanyak telusuran arah panah yang dibuat pada gambar 1.2. Hipotesis-hipotesis yang dibangun akan berdasar kepada masalah dan tujuan penelitian yang telah ada. Rumusan hipotesis tersebut tergambar pada uraian berikut:

1. Terdapat hubungan fungsional antara partisipasi masyarakat dalam perencanaan program sekolah dasar dengan kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumber daya sekolah.

2. Terdapat hubungan fungsional antara partisipasi masyarakat dalam implementasi program dengan kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumber daya sekolah.
3. Terdapat hubungan fungsional antara partisipasi masyarakat dalam pengawasan program dengan kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumber daya sekolah.
4. Terdapat hubungan fungsional antara partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan program sekolah dasar dengan kemandirian sekolah dalam memanfaatkan sumber daya sekolah.
5. Terdapat perbedaan tingkat kemandirian sekolah dasar dalam memanfaatkan sumberdaya sekolah antara yang tidak dan yang menerapkan model pengelolaan program sekolah dasar berbasis masyarakat.

G. Batasan Istilah dan Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas arah penelitian, maka penulis memberikan batasan istilah dan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengelolaan program sekolah dasar, dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai serangkaian kegiatan perencanaan, implementasi program-program dan pengawasan terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efisien untuk mencapai tujuan Sekolah Dasar.
2. Keterlibatan pengelolaan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai keikutsertaan (berperannya) dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sekolah dasar, baik dalam perencanaan, implementasi program-

program Sekolah Dasar maupun pengawasannya. Disarikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (DEPDIKNAS, 2001:668)



3. Tanggungjawab pengelolaan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu fungsi pembebanan kepada masyarakat secara hukum dalam hal pengelolaan sekolah dasar. Disarikan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (DEPDIKNAS, 2001:1139)
4. Kemandirian sekolah dasar dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu momot karakteristik yang dimiliki lembaga pendidikan dasar dalam hal ini Sekolah Dasar sehingga mampu membuat keputusan sendiri secara masak dan mampu mensistemkan dan mensinergikan lingkungannya secara baik. Nilai-nilai dasar kemandirian dalam hal ini meliputi: 1) otonomi, 2) demokrasi, 3) kompetitif, 4) kreatif dan 5) unggul.

H. Manfaat Penelitian

Secara teoritik temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan model pengelolaan sekolah dasar yang berbasis masyarakat, di mana sekolah mampu secara mandiri menemukan, menganalisis dan sekaligus memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekolah. Sehingga sekolah dasar menjadi lebih bermutu dan memberikan input yang berkualitas bagi tingkat pendidikan di atasnya. Pengelolaan sekolah dasar dan kemandirian sekolah dasar dalam manajemen pendidikan adalah dua komponen yang paling mendasar dalam mendukung keterlaksanaannya dalam dunia sekolah khususnya dunia sekolah dasar. Terutama berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah begitu pula keterlibatan

masyarakat khususnya komite sekolah sebagai kelompok yang tidak dapat terpisahkan dalam pengelolaan sekolah dasar. Di samping itu pula temuan penelitian ini memberikan pengayaan terhadap manajemen pendidikan tidak hanya dilihat secara murni pada konteks manajemen, akan tetapi pada konteks lain yang memberikan dukungan kuat bagi pengembangan sekolah, kepala sekolah, guru serta masyarakat yang terlibat di dalamnya juga masyarakat sekitar sekolah yang dianggap berperan terhadap kondisi-kondisi tersebut.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam mengelola sekolah dasar yang dipimpinnya. Juga bagi komite sekolah, terutama dalam menggalang masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan pembangunan sekolah dasar yang ada di lingkungan masyarakatnya.

